

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan studi kepustakaan, selain mendapatkan teori-teori berkaitan variabel penelitian yang bersumber dari buku referensi juga memperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variabel penelitian. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1. Hotlina Sihombing (2022). “Implementasi Program Jemput Bola Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan KTP-EL Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera”.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program jemput bola yang dilaksanakan oleh Dinas Dukapil dan faktor pendukung dan penghambat program jemput bola dalam meningkatkan kualitas pelayanan KTP-el bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Dairi. Teori yang digunakan Teori Implementasi menurut Edward III dengan empat (4) indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi program Jemput Bola dalam meningkatkan pelayanan KTP-el bagi penyandang disabilitas telah terlaksana dengan baik hanya saja belum optimal disebabkan oleh beberapa hal faktor penghambat dalam impelentasi kebijakan ini yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat penyandang disabilitas maupun keluarga penyandang disabilitas, permasalahan jaringan serta sulitnya aksesibilitas menuju rumah penyandang disabilitas.

2. Rahma Amelia (2022). “Inovasi Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Program SIPINTAR PEDULI Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru”.

Tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan pembuatan KTP Elektronik bagi Penyandang Disabilitas melalui program SIPINTAR PEDULI serta faktor penghambat dalam penerapan inovasi pelayanan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Inovasi Rogers yang terdiri dari lima (5) dimensi yaitu keuntungan relative, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba dan kemudahan diamati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dari kelima dimensi berdasarkan teori inovasi rogers terdapat satu dimensi yang masih ditemukan kendala. Pada dimensi kesesuaian ini sudah terlaksana baik dengan adanya inovasi pelayanan ini membantu pemerintah dalam menertibkan administrasi, Dimensi Keumitan ini masih adanya kendala yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, pada Dimensi Kemungkinan Dicoba sudah terlaksana dengan baik dengan adanya peningkatan dalam kepemilikan KTP Elektronik bagi Penyandang Disabilitas dan Dimensi Kemudahan diamati ini masyarakat merespon baik adanya inovasi pelayanan ini.

3. Winda Sari Damayanti (2022). “Peran Pemerintah Desa Dalam Menyukkseskan Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten”.

Tujuan penelitan ini untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam menyukkseskan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat lima peran Pemerintah Desa yaitu sebagai fasilitator, mobilisator, regulator, perantara dan petugas operator desa. Hambatan yang ditemukan di Pemerintah Desa dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa adanya perubahan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, sosialisasi, sumber daya manusia dan anggaran petugas operator desa. Faktor eksternal yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan.

4. Putri Bunga Kasih (2022). “Implementasi Layanan e-KTP Melalui Program Jemput Bola Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara”.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi layanan e-KTP melalui program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Implementasi Edward III. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan pelayanan e-KTP melalui program jemput bola sudah berjalan dengan baik namun kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kepemilikan e-KTP di Kabupaten Buton Tengah masih kurang dan masih kurangnya ketidaksesuaian yang muncul di lapangan seperti sarana dan prasarana.

5. Munad Ziroh (2020). “Implementasi Program Jemput Bola Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Disdukcapil Kabupaten Ketapang”.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan implementasi program

jemput bola dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, observasi. Teori yang digunakan adalah teori Edward III yang memiliki empat variabel yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini adalah dalam implementasi program jemput bola dalam pembuatan akta kelahiran masih kurang dalam variabel komunikasi dan sumber daya. Masih kurangnya sosialisasi mengenai program ini kepada masyarakat sehingga menimbulkan miss komunikasi. Dalam sumber daya pun masih kurang karena jumlah pegawai/staff yang datang dalam pelaksanaan tidak seimbang dengan warga yang datang. Untuk variabel disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Hotlina Sihombing (2022). Implementasi Program Jemput Bola Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan KTP-EL Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera.	Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi program Jemput Bola dalam meningkatkan pelayanan KTP-el bagi penyandang disabilitas telah terlaksana dengan baik hanya saja belum optimal disebabkan oleh beberapa hal faktor penghambat dalam impelentasi kebijakan ini yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat penyandang disabilitas maupun keluarga penyandang disabilitas, permasalahan	Perbedaan ini terdapat pada tujuannya, peneliti ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta lokus penelitian.

			<p>jaringan serta sulitnya aksesibilitas menuju rumah penyandang disabilitas.</p>	
2	<p>Rahma Amelia (2022). Inovasi Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Program SIPINTAR PEDULI Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.</p>	<p>Metode penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dari kelima dimensi berdasarkan teori inovasi rogers terdapat satu dimensi yang masih ditemukan kendala. Pada dimensi kesesuaian ini sudah terlaksana baik dengan adanya inovasi pelayanan ini membantu pemerintah dalam menertibkan administrasi, Dimensi Keumitan ini masih adanya kendala yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, pada Dimensi Kemungkinan</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat di lokasi penelitian dan juga penelitian ini membahas mengenai Inovasi.</p>

			<p>Dicoba sudah terlaksana dengan baik dengan adanya peningkatan dalam kepemilikan KTP Elektronik bagi Penyandang Disabilitas dan Dimensi Kemudahan diamati ini masyarakat merespon baik adanya inovasi pelayanan ini.</p>	
3	<p>Winda Sari Darmayanti (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Menyukkseskan Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat lima peran Pemerintah Desa yaitu sebagai fasilitator, mobilisator, regulator, perantara dan petugas operator desa. Hambatan yang ditemukan di Pemerintah Desa dapat dilihat dari faktor internal dan</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian serta pembahasan utamanya peneliti ini membahas mengenai Peran.</p>

			<p>eksternal. Faktor internal berupa adanya perubahan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, sosialisasi, sumber daya manusia dan anggaran petugas operator desa.</p> <p>Faktor eksternal yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan.</p>	
4	<p>Putri Bunga Kasih (2022). Implementasi Layanan e-KTP Melalui Program Jemput Bola Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi</p>	<p>Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan pelayanan e-KTP melalui program jemput bola sudah berjalan dengan baik namun kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian.</p>

	Tenggara.		kepemilikan e-KTP di Kabupaten Buton Tengah masih kurang dan masih kurangnya ketidaksesuaian yang muncul di lapangan seperti sarana dan prasarana.	
5	Munad Ziroh (2020). Implementasi Program Jemput Bola Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Disdukcapil Kabupaten Ketapang.	Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif penelitian deskriptif,	Hasil penelitian ini adalah dalam implementasi program jemput bola dalam pembuatan akta kelahiran masih kurang dalam variabel komunikasi dan sumber daya. Masih kurangnya sosialisasi mengenai program ini kepada masyarakat sehingga menimbulkan miss komunikasi. Dalam sumber daya pun masih kurang	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian.

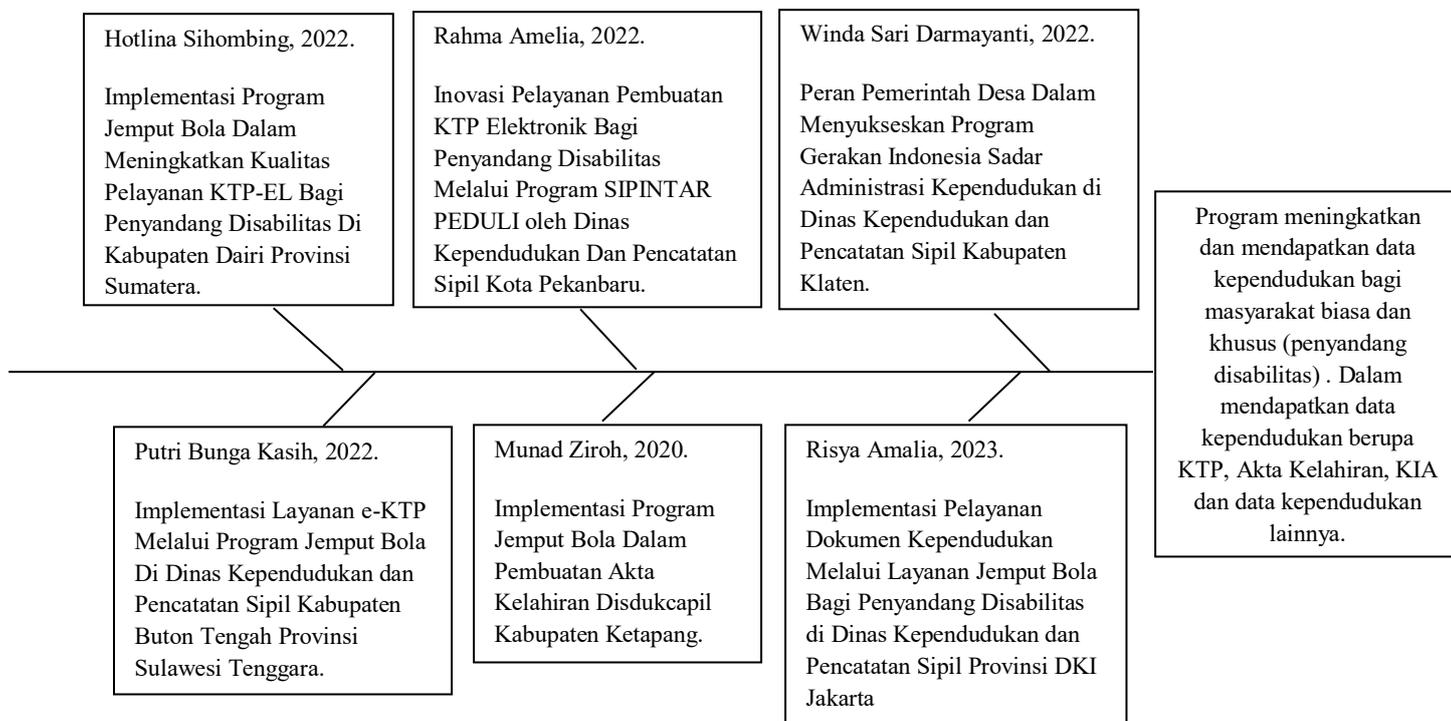
			<p>karena jumlah pegawai/staff yang datang dalam pelaksanaan tidak seimbang dengan warga yang datang. Untuk variabel disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik.</p>	
--	--	--	---	--

Sumber Data: Data diolah oleh peneliti pada tahun 2022

Pada penelitian terdahulu seperti yang telah dijabarkan diatas menunjukkan bahwa terdapat penelitian-penelitian yang mempunyai variabel terkait dengan penelitian ini yaitu Implementasi Program-Program Pelayanan Administrasi Kependudukan. Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bagaimana pemerintah melaksanakan program-program mengenai pelayanan administrasi kependudukan untuk melengkapi data kependudukan para masyarakat serta memenuhi hak dan kewajiban masyarakat dalam kepemilikan data kependudukan. Disamping itu, terdapat juga perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya yaitu pada subjek penelitiannya. Pelayanan administrasi kependudukan yang diteliti disini adalah pendataan dan penerbitan biodata kependudukan dan untuk sarannya disini ialah peneliti fokus pada penyandang disabilitas. Penelitian terdahulu belum terdapat lokus penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Gambar 2.1

Fishbone Penelitian Terdahulu



Sumber: Data diolah oleh peneliti pada tahun 2022

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Implementasi

Implementasi adalah langkah yang sangat terpenting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi suatu kebijakan hanyalah sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi ini sangat penting dalam suatu pemerintahan. Sebuah program kebijakan harus diimplementasikan agar memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan ialah tahap yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik.

Implementasi secara etimologis dapat disamakan dengan kata “pelaksanaan”. Pengertian implementasi secara etimologis menurut kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “to implement”, yang dalam kamus besar Webster, “*to implement*” (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Huntington, (1968:1) perbedaan yang paling terpenting antara satu negara dengan negara lainnya tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu dapat dilihat dalam kemampuan implementasi setiap keputusan atau kebijakan yang telah dibuat oleh sebuah politbiro, cabinet, atau presiden negara itu.

2.2.2 Kebijakan Publik

Secara umum, istilah “kebijakan” digunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan). Ada banyak pendapat tentang definisi kebijakan. Smith dan Larimer (2009:3) di dalam bukunya yang berjudul “*The Public Policy Theory Primer*” mengemukakan tentang berbagai pendapat tentang kebijakan. *Policy is whatever governments choose to do or no to do* (Kebijakan itu menurut Dye adalah apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah) (Dye,

1987:1). Dilakukan atau tidak dilakukannya sebuah kebijakan merupakan bentuk dari kebijakan publik.

Aminuddin Bakry (2010), mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara. Pengaturan dan pengelolaan terhadap aspek-aspek yang bertujuan untuk kepentingan publik adalah dalam rangka untuk tercapainya tujuan publik tersebut. Pengaturan melalui kebijakan akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder kebijakan, baik sebagai obyek maupun sebagai subyek. Di samping itu, kebijakan mempunyai legitimasi yang kuat dalam penerapannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian kebijakan publik mempunyai banyak tafsir dan makna, tetapi secara prinsip dan esensi adalah sama. Pandangan dan paradigma kebijakan publik sebagai sebuah ilmu mempunyai cara pandang tersendiri bagi sebagian ahli.

2.2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dilihat dalam pengertian yang luas, tahap proses kebijakan segera setelah adanya penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas memiliki makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama untuk melaksanakan kebijakan dengan upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan ataupun program.

Dr. Riant dalam bukunya *Public policy* Dinamika kebijakan publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik (2018:739) mengutip apa yang disampaikan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan serta memahami hal-hal yang harusnya terjadi. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya.

Menurut dun (2003:25), mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang kebijakannya telah dirumuskan. Tanpa suatu

implementasi maka sebuah kebijakan yang telah dirumuskan atau disiapkan akan terasa sia-sia. Maka dari itu, implementasi kebijakan memiliki kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari urutan penetapan dalam kebijakan publik, di samping formulasi kebijakan, penelitian kebijakan, dan lain-lain.

Menurut Edward III, implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan serta direncanakan dengan baik maka tujuan dari kebijakan publik yang ingin dituju tidak akan terwujud.

Teori dari beberapa ahli tersebut menyimpulkan bahwa implementasi ialah sebuah proses yang paling penting dalam kebijakan. Implementasi juga banyak melibatkan aktor ataupun organisasi dalam pelaksanaannya dan dilaksanakan dalam waktu tertentu.

2.2.4 Model Implementasi Kebijakan

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik. Proses implementasi ini adalah sebuah performansi suatu paham kebijakan yang dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan variabel. Variabel dalam model ini terdiri dari:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas sehingga para pelaksana dapat merealisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka akan terjadi konflik diantara para pelaku implementasi.

2. Sumber daya

Dalam implementasi sangat dibutuhkan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya waktu maupun sumber daya keuangan (finansial).

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Dalam implementasi ini harus memiliki prosedur-prosedur kerja standar (SOP) dan Fragmentasi. Fragmentasi merupakan kondisi akibat tekanan lingkungan birokrasi termasuk lingkungan politik dan konstitusi.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan

Dalam implementasi ini para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang diharapkan dari dirinya dan harus tahu apa yang akan dilaksanakan. Keberhasilan implementasi ini ditentukan oleh komunikasi yang baik, terarah dan jelas kepada para pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi.

b. Model Edward III

Menurut Edward III (dalam Leo Agustino, 2006, 149-153) menyarankan bahwa untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi lebih efektif. Empat indikator yang dikemukakan oleh Edward III adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Keberhasilan dalam komunikasi ini diharapkan implementator mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tujuan serta sasaran kebijakan yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi ketidakpahaman kelompok sasaran dan akan terjadinya resistensi dari kelompok sasaran. Terdapat 3 indikator yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- Kejelasan, komunikasi yang diterima harus jelas dan tidak ambigu kepada para pelaksana kebijakan.
- Konsistensi, perintah yang diberikan harus konsisten dan jelas supaya dapat diterapkan dan dijalankan.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Indikator dari sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu sebagai berikut:

- Staff, merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan.
- Informasi, informasi terdiri dari dua bentuk yakni informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- Wewenang, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.
- Fasilitas, fasilitas salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi memungkinkan memiliki staf yang cukup dan kompeten tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi merupakan faktor penting ketiga dalam implementasi kebijakan. Disposisi ini sebagai watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Disposisi dalam hal ini terdiri dari:

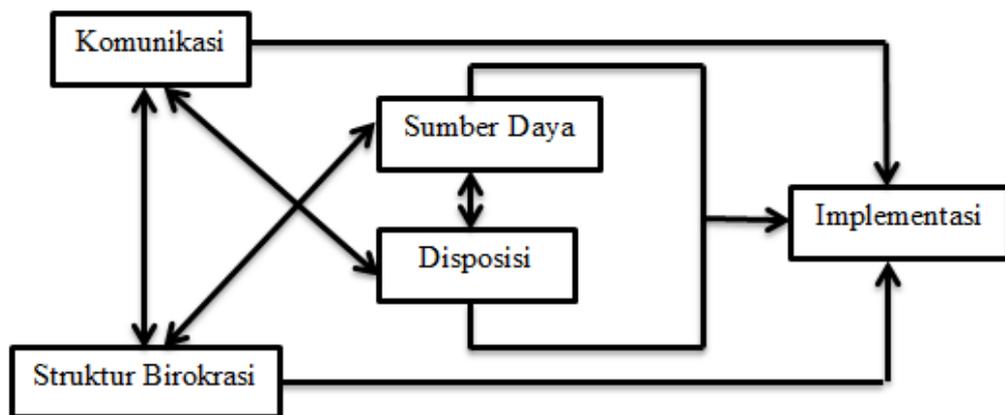
- Pengangkatan birokrasi, pengangkatan dan pemilihan personel kebijakan harus orang yang memiliki dedikasi kebijakan yang telah ditetapkan.
- Insentif, dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ialah orang yang bertugas dalam mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap implementasi kebijakan. Untuk menuju arah yang lebih baik lagi dalam kinerja struktur birokrasi ini terdapat beberapa elemen sebagai berikut:

- Standar Operating Procedures (SOP), merupakan aspek penting karena adanya operasi yang standar.
- Fragmentasi, melaksanakan ini untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja.



Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Edward III

Sumber: Edward III (1980:21)

c. Model Merilee S. Grindle

Dalam model implementasi kebijakan menurut Grindle (1980:11) dalam buku Leo Agustino model ini memperlihatkan adanya suatu keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari proses pencapaian *outcomes* (tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai). Dapat dilihat dari dua hal berikut ini:

1. Dilihat dari proses, dengan mempertanyakan apakah pelaksana sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dengan mengacu pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini dapat dilihat dengan melihat dua faktor yaitu, 1) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok dan 2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu Implementasi kebijakan menurut Grindle dapat ditentukan dari *content of policy* dan *context of policy*. Dari kedua model tersebut terbagi kembali menjadi beberapa variabel yaitu:

1. *Content of policy* atau Isi Kebijakan, terdiri dari:

1) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berpendapat bahwa sebuah kebijakan ini dalam pelaksanaannya akan melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan tersebut memberikan pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin dilihat lebih lanjut.

2) *Type of benefits* (tipe manfaat)

Keberhasilan suatu kebijakan apabila kebijakan tersebut memiliki manfaat yang banyak kepada kelompok sasarannya dan kebijakan itu akan mendapat dukungan yang banyak dari kelompok sasarannya. Poin ini pun berupaya untuk menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan.

3) *Extent of change envisioned* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Sebuah kebijakan yang memiliki keinginan untuk melakukan perubahan yang sangat besar. Sehingga dapat dilihat seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan tersebut.

4) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan)

Keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan diimplementasikan sangat bergantung pada pengambilan keputusan. Maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang diimplementasikan.

5) Program *implementors* (pelaksanaan program)

Implementator perlu memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat supaya kebijakan tersebut berhasil. Karena keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah para implementator tersebut.

6) *Resources commited* (sumber daya yang digunakan)

Bersedianya para sumber daya pendukung implementasi kebijakan akan memiliki keberhasilan dalam kebijakan tersebut. Tentu dengan kurangnya para sumber daya pendukung akan menyulitkan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

2. *Context of policy* atau lingkungan kebijakan terdiri dari:

1) *Power, interest, and strategies of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat kekuasaan) Penting dalam sebuah implementasi kebijakan ini untuk memiliki kekuatan, kepentingan, dan strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Karena itu akan menghasilkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut.

2) *Institution and regime characteristics* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Perlu adanya dukungan instansi dan rezim yang berkuasa, karena keberhasilan akan ditentukan oleh dukungan tersebut. Analisis atas implementasi dari program yang spesifik dalam interaksinya akan dipertimbangkan penilaian kapabilitas kekuasaan dari para aktor, kepentingan-kepentingannya dan strategi untuk mencapainya serta karakteristik dari penguasa.

3) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Kebijakan akan berhasil jika ada kesesuaian tujuan dan bentuk program. Para implementator pun bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan. Supaya efektif maka implementator harus memiliki keahlian dalam seni berpolitik dan harus memahami dengan baik lingkungan dimana mereka akan merealisasikan kebijakan publik dan program-programnya.



Gambar: Model Implementasi Kebijakan Grindle

Sumber: Grindle (1980:11)

2.3 Gerakan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Gerakan bersama dalam pelayanan administrasi kependudukan merupakan program yang sangat penting, karena sebagai bentuk komitmen dan keberpihakan bersama dalam memberikan pelayanan, dukungan dan akses untuk para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil berkolaborasi dengan kantor Staff Khusus Presiden dan Kemendikbudristek. Berpedoman dalam UU no. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Gerakan ini merupakan gerakan yang memiliki kegiatan untuk melakukan pendataan, perekaman dan penerbitan dokumen (KTP-EL, dan KIA) kependudukan bagi penyandang disabilitas guna membangun masyarakat yang inklusif di seluruh Indonesia. Kegiatan ini pun memiliki tantangan karena perlunya kesadaran keseluruhan antara petugas dinas dukcapil daerah setempat

serta orang tua atau wali untuk segera mencatatkan kependudukan disabilitas supaya terdata sebagai penyandang disabilitas.

Gerakan bersama pelayanan administrasi kependudukan ini memiliki maksud dan tujuan untuk sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data disabilitas di SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
2. Pemberian dokumen kependudukan berupa KIA dan KTP EL bagi penyandang disabilitas.

2.3.1 Layanan Jemput Bola

Layanan jemput bola merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh para petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota ataupun kabupaten dengan cara mendatangi berkeliling pada lokasi-lokasi seperti kecamatan, desa, lapas, sekolah luar biasa, panti sosial dan juga lokasi yang memang jauh dari akses pelayanan.

Layanan jemput bola ini membantu dalam percepatan pendataan masyarakat rentan, masyarakat yang memang lokasi rumah jauh dan susah dari akses pelayanan publik. Layanan ini juga sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan dan mempercepat pelayanan dokumen kependudukan.

2.3.2 Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Pendataan adalah upaya mengumpulkan data penduduk yang akan dicatat lalu akan diterbitkan dokumen kependudukannya. Dokumen kependudukan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

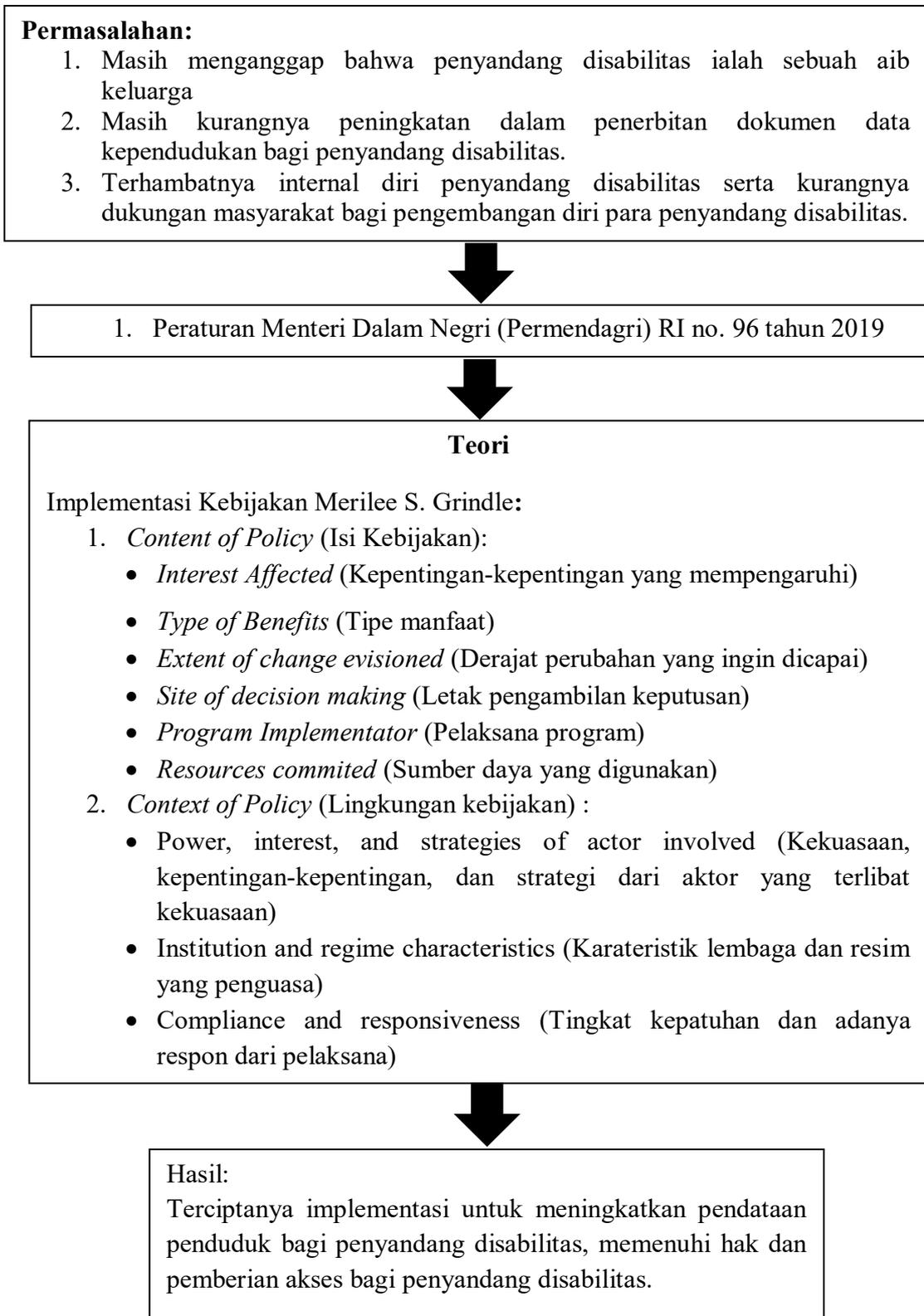
Kartu tanda kependudukan elektronik atau yang biasa disebut KTP-El merupakan sebuah tanda identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang telah

diterbitkan oleh Dinas Dukcapil daerah kabupaten atau kota dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

KTP-el berisi informasi data diri yang berisi foto, tanda tangan, nama, alamat, jenis kelamin, tempat atau tanggal lahir, agama, status pekerjaan, kewarganegaraan dan juga Nomor Induk Kependudukan (NIK). Masyarakatpun hanya diperbolehkan memiliki satu KTP-el yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas tunggal yang dimiliki setiap penduduk dan berlaku seumur hidup dan nantinya akan banyak digunakan untuk keperluan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), pembuatan paspor dan masih banyak lagi.

2.4 Kerangka Konsep

Gambar 2.3 Kerangka Konsep



Sumber: Data diolah oleh peneliti pada tahun 2022

Pada bagian kerangka konsep ini, akan menjabarkan bagaimana Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Jemput Bola Bagi Penyandang Disabilitas Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle yang terdiri dari:

1. *Content Of Policy* (Isi Kebijakan)

Isi Kebijakan ini terdiri lagi menjadi beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

- *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), dengan adanya kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi ini, bahwa sebuah program dalam pelaksanaannya dapat melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
- *Type of Benefits* (Tipe manfaat), dengan adanya manfaat ini ingin memperlihatkan bahwa dalam sebuah kebijakan harus ada manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dalam implementasi program pelayanan adminduk bagi penyandang disabilitas.
- *Extent of change evisioned* (derajat perubahan yang ingin dicapai), dengan adanya indikator ini dapat dilihat sejauh mana perubahan yang terjadi dalam mencapai target yang diinginkan pada implementasi program tersebut.
- *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan), dengan adanya pengambilan keputusan ini dalam sebuah kebijakan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Maka akan dijelaskan bagaimana letak pengambilan keputusan dari program yang akan dilaksanakan.
- *Program Implementator* (pelaksana program), dengan adanya *implementator* merupakan sebuah keharusan dalam pelaksanaan sebuah

program. Maka dapat dilihat apakah kebijakan telah menyebutkan implementator dengan rinci.

- *Resources committed* (sumber daya), dengan adanya indikator ini dapat dilihat dalam persiapan sumber daya dalam pelaksanaan program ini. Apakah program pelayanan administrasi kependudukan ini sudah didukung oleh sumber daya yang memadai.

2. Context Of Policy (Lingkungan Kebijakan)

Lingkungan Kebijakan ini terbagi kembali menjadi beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

- *Power, interest, and strategies of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat kekuasaan), dengan adanya indikator ini dapat mengukur seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan program pelayanan administrasi kependudukan.
- *Institution and regime characteristics* (karakteristik lembaga dan resim yang penguasa), dengan adanya indikator ini dapat dilihat dalam lingkungan kebijakan tersebut dilaksanakan dapat pengaruh terhadap keberhasilannya, dan akan dijelaskan mengenai karakteristik dari suatu lembaga yang turut andil dalam mempengaruhi sebuah kebijakan.
- *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana), dengan adanya indikator ini akan diukur sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon masyarakat setempat untuk mendukung program pelayanan administrasi penduduk.